BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari jumlah anggota SKPD, Jumlah OPD, Pendidikan Terakhir Kepala Daerah terhadap tingkat pengungkapan wjaib lapoan keuangan pemerintah daerah. Dalam bab ini akan akan diuraikan hasil penelitian mengenai pengaruh jumlah anggota DPRD, Jumlah OPD, Pendidikan Terakhir Kepala Daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan 97 laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2017. Hasil dari analisis hasil penelitian ini akan menjadi informasi dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Masing-masing data tersebut merupakan data yang dicantumkan di dalam laporan keuangan pemerintah daerah provinsi. Tingkat pengungkapan akan dihitung sesuai dengan jumlah pengungkapan wajib pemerintah daerah provinsi dalam laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1. ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu jumlah anggota DPRD, jumlah OPD, pendidikan terakhir kepala daerah, luas wilayah sebagai variabel independen dan umur administratif pemerintahan daerah, jumlah penduduk sebagai variabel kontrol serta Tingkat Pengungkapan Wajib

Laporan Keuangan Daerah sebagai variabel dependen. Variabel tersebut telah diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	n	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
DPRD (Jumlah DPRD)	97	3,00	3,91	3,5763	0,27299
OPD (Jumlah OPD)	97	3,18	4,39	3,8500	0,24541
PENDIDIKAN (Pendidikan Terakhir Kepala Daerah)	97	1	4	0,9717	0,39618
PENDUDUK (Jumlah Penduduk)	97	10,61	15,96	13,0182	0,99546
LUAS (Luas Wilayah)	97	3,23	10,69	6,8227	1,73792
UMUR (Umur Administratif Pemerintahan Daerah)	97	2,3	4,28	3,6324	0,62966
PENGUNGKAPAN (Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD)	97	0,47	0,7	0,6171	0,04088

Hasil Data Diolah, 2019

Dari hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.1 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel Jumlah anggota DPRD diukur dengan jumlah anggota DPRD yang ada di daerah kabupaten/kota tersebut. Dalam uji ini jumlah anggota DPRD di ubah kedalam bentuk natura logaritma. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 4.1 di atas maka dapat diketahui bahwa

Jumlah anggota DPRD mempunyai nilai minimum sebesar 3,00 nilai maksimum sebesar 3,91 dengan rata-rata nilai 3,5763 dan standar deviasi sebesar 0,27299. Nilai minimal sebesar 3,00 artinya daerah yang memiliki jumlah anggota DPRD terkecil adalah Kota Sabang, Kabupaten Aceh jaya, Kota Pariaman, Kota Tomohon, Kabupaten Buru, Kabupaten Asmat, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Natuna yang berjumlah 20 orang sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota DPRD yang tertinggi dengan jumlah 50 orang yaitu Kota Medan, Kota Batam, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur.

2. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah diukur berdasarkan dari total jumlah Organisasi Perangkat Daerah pada pemerintah provinsi dan diubah ke dalam bentuk natura logaritma. Tabel 4.1 menjelaskan hasil uji statistik deskriptif yang diketahui bahwa angka minimum 3,81 sedangkan angka maksimum 4,39 dan ukuran rata-rata 3,8500. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah OPD terendah adalah Kabupaten Barito Timur sebanyak 24 dan pemerintah daerah yang memiliki jumlah OPD tertinggi adalah Kota Manado dengan jumlah 135 OPD.
3. Pendidikan terakhir menggunakan skala pengukuran yang dikelompokkan menjadi 4 angka. Tabel 4.1 menjelaskan hasil uji statistik deskriptif yang diketahui bahwa angka minimum 1 dan maksimum 4 . Ada beberapa kepala daerah Kabupaten/Kota yang memiliki riwayat pendidikan terakhir tingkat SMA hingga tingkat S3.

4. Luas wilayah diukur dengan menggunakan total luas wilayah dari Kabupaten/Kota tersebut. Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa Luas Wilayah Kabupaten/Kota memiliki rata-rata 6,8227. Pemerintah daerah yang memiliki Luas Wilayah yang terluas adalah Kabupaten Marauke sebesar 44.071 km^2 dan Kota Bukittinggi memiliki Luas Wilayah tersempit sebesar 25,24 km^2.
5. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tabel 4.1 yang merupakan hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa pengungkapan LKPD tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Kota Semarang menunjukkan tingkat pengungkapan tertinggi sebesar 70,7% sedangkan Kota Pariaman menunjukkan tingkat pengungkapan terendah yaiu hanya 47,34%. Nilai rata-rata pengungkapan LKPD pada periode tahun 2017 sebesar 61,71%, pengungkapan LKPD yang dilakukan oleh pemerintah daerah cenderung meningkat dari tahun ke tahun namun ada beberapa daerah yang mengalami penurunan.

4.2. UJI ASUMSI KLASIK

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji model regresi sehingga diperoleh model regresi dari metode kuadrat terkecil yang menghasilkan estimator linier tidak bias. Model regresi yang diperoleh berdistribusi normal dan terbebas dari gejala mutikolieneritas, dan heteroskedastisitas.

4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data yang akan dianalisis untuk melihat apakah data tersebut memiliki distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-smirnov* terhadap nilai residual pada hasil persamaan regresi. Apabila nilai sig > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dat berdistribusi normal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.

Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03897876
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.042
	Negative	-.068
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Hasil data Diolah, 2019

Dari Tabel 4.2 uji normalitas diketahui bahwa nilai pada *Asymp.* Sig (2-tailed) adalah 0,200, yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai sig. Berdasakan hasil dari uji normalitas data yang diolah dapat dikatakan berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa uji normalitas telah terpenuhi dan data yang digunakan layak untuk diolah.

4.2.2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pengujian untuk

mengetahui adanya multikolinearitas dilakukan dengang memperhatikan besarnya tolerance value dan besarnya VIF (Ghozali, 2016). Jika nilai *tolerance* value >0,10 atau < 1 dan VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3

Uji Multikolonieritas

Hasil Data Diolah,2019

Variabel	**Collinearity Statistics**		**Kesimpulan**
	Tolerance	**VIF**	
DPRD (Jumlah anggota DPRD)	0,324	3,087	Tidak terjadi multikolinearistas
OPD (Jumlah OPD)	0,801	1,249	Tidak terjadi multikolinearistas
PENDIDIKAN (Pendidikan Terakhir Kepala Daerah)	0,860	1,163	Tidak terjadi multikolinearistas
PENDUDUK (Jumlah Penduduk)	0,303	3,301	Tidak terjadi multikolinearistas
LUAS (Luas Wilayah)	0,883	1,132	Tidak terjadi multikolinearistas
UMUR (Umur Administratif Pemerintahan Daerah)	0,795	1,258	Tidak terjadi multikolinearistas

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa nilai dari VIF (*Variance Inflation Factor*) adalah < 10 untuk semua variabel. Dengan hasil nilai VIF dari Jumlah anggota DPRD sebesar 3,087; nilai VIF dari Jumlah OPD sebesar 1,249; nilai VIF dari Pendidikan Terakhir Kepala Daerah sebesar 1,163; nilai VIF Jumlah Penduduk sebesar 3,301; nilai VIF Luas Wilayah sebesar 1,132; nilai VIF Umur Administratif Pemerintah Daerah sebesar 1,258. Sedangkan

untuk nilai *Tolerance* > 0,10 atau < 1 dengan nilai *Tolerance* dari Jumlah anggota DPRD 0,324; nilai *Tolerance* dari Jumlah OPD sebesar 0,801; nilai *Tolerance* dari Pendidikan Terakhir Kepala Daerah sebesar 0,860; nilai *Tolerance* dari Jumlah Penduduk sebesar 0,303; nilai *Tolerance* dari Luas Wilayah sebesar 0,883; nilai *Tolerance* dari Umur Administratif Pemerintahan Daerah sebesar 0,795. Jadi berdasarkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance* dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung multikolinearitas, sehingga pengujian selanjutnya dapat dilanjutkan karena telah memenuhi syarat pengujian asumsi klasik yaitu tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul ketika varian dari distribusi probabilitas gangguan tidak konstan untuk seluruh pengamatan atas variabel penelitian (Ghozali, 2016). Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastistias dalam penelitian ini memakai diagram *scatterplot*. Hasil uji heteroskedastisitas dapat ditunjukkan pada Gambar sebagai berikut:

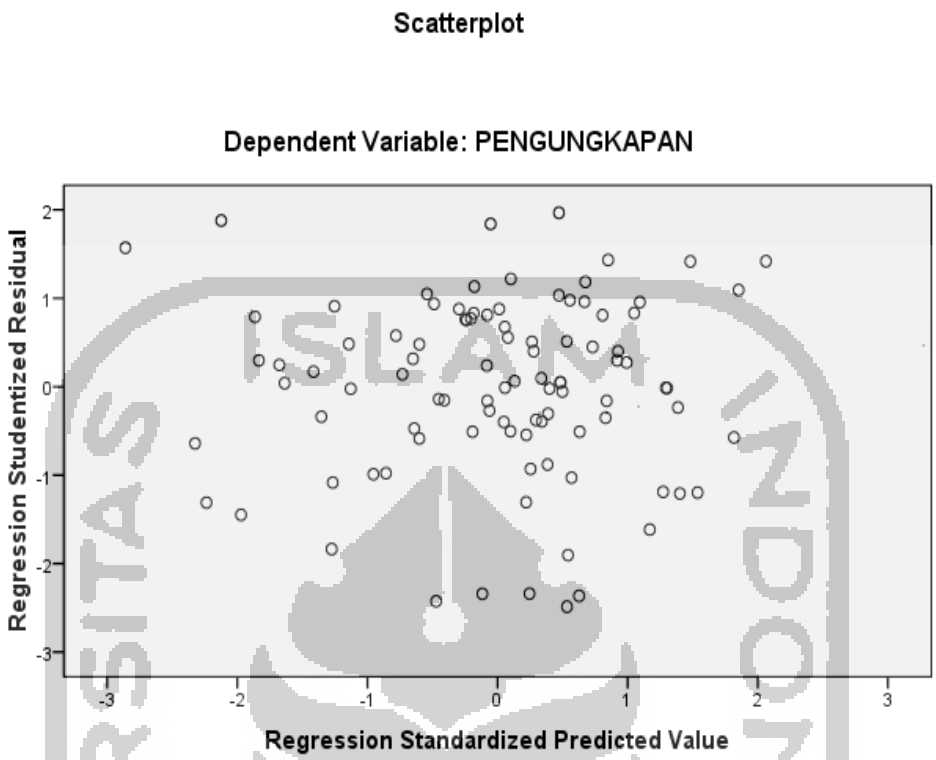

Hasil Data Diolah, 2019

Melalui grafik *scatter plot* pada gambar diatas maka dapat dilihat pola penyebaran data yang ada. Pola penyebaran data yang berupa titik-titik pada *scatter plot* menyebar di atas dan di bawah dan penyebarannya tidak membentuk pola tertentu, sehingga dari pola penyebaran ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi, berdasarkan *scatter plot* diatas maka asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

4.3. ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Model analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah Jumlah anggota DPRD, Jumlah

OPD, Pendidikan Terakhir Kepala Daerah, Luas Wilayah. Variabel yang akan dipengaruhi adalah tingkat pengungkapan LKPD Provinsi di Indonesia. Hasil Perhitungan regresi berganda pada penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Analisis Regresi berganda

Variabel	B	t	Sig.
(Constant)	0,609	8,081	0
DPRD (Jumlah anggota DPRD)	0,04	1,514	0,134
OPD (Jumlah OPD)	0,008	0,406	0,686
PENDIDIKAN (Pendidikan Terakhir Kepala Daerah)	0,008	0,675	0,502
LUAS (Luas Wilayah)	-0,005	-2,003	0,048
PENDUDUK (Jumlah Penduduk)	-0,005	-1,627	0,107
UMUR (Umur Administratif Pemerintahan Daerah)	0,006	0,803	0,424
	Adj R : 0,030		
	F : 1,502		
	Sig : 0,187		

Hasil Data Diolah, 2019

Secara matematis hasil dari analisis regresi berganda pada Tabel 4.4 dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 0{,}609 + 0{,}04X_1 + 0{,}008X_2 + 0{,}008X_3 – 0{,}005X_4 – 0{,}005X_5 + 0{,}006X_6$$

Dari persamaan diatas menunjukkan pengaruh variabel dependen (Y atau tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Di Indonesia). Arti dari koefisien regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 0,609 menyatakan bahwa, apabila variabel bebas atau independen bernilai nol, maka nilai pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia adaah sebesar 0,609.
2. Koefisien regresi X1 sebesar 0,04 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai X1 akan meningkatkan Y sebesar 0,04.
3. Koefisien regresi X2 sebesar 0,008 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai X2 akan meningkatkan Y sebesar 0,008.
4. Koefisien regresi X3 sebesar 0,008 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai X3 akan meningkatkan Y sebesar 0,008.

5. Koefisien regresi X4 sebesar -0,005 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai X4 akan menurunkan Y sebesar 0,005.
6. Koefisien regresi X5 sebesar -0,005 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai X5 akan menurunkan Y sebesar 0,005.
7. Koefisien regresi X6 sebesar 0,006 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai X6 akan meningkatkan Y sebesar 0,006.

4.4. UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Pengukuran koefisien determinasi merupakan pengujian yang bertujuan untuk milihat kemampuan variabel independen di dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Hasil analisis koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 0.030. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh atau kontribusi variabel independen yaitu Jumlah anggota DPRD, Jumlah OPD, Pendidikan Terakhir Kepala Daerah, Luas Wilayah sebesar 3,0% mempengaruhi variabel pengungkapan wajib LKPD sedangkan sisanya 97% dipengaruhi faktor lain diluar variabel yang diatas.

4.5. UJI HIPOTESIS

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t sebagai berikut:

1. Pengaruh jumlah anggota DPRD terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

H_0 $b_1 = 0$ jumlah anggota DPRD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

H_1 $b_1 \neq 0$ jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

Berdasarkan dari hasil perhitungan menggunakan uji statistik t, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel jumlah anggota DPRD sebesar 0,134. Diakarenakan nilai p value lebih besar dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau (0,134 > 0,05) maka H_1 ditolak, yang berarti jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

2. Pengaruh jumlah OPD terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

H_0 : $b_2 = 0$ jumlah OPD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

H_1 : $b_2 \neq 0$ jumlah OPD tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

Berdasarkan dari hasil perhitungan menggunakan uji statistik t, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel kekayaan pemerintah daerah sebesar 0,686. Dikarenakan p value lebih besar dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau (0,686 > 0,05) maka H_2 ditolak yang berarti jumlah OPD tidak

berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

3. Pengaruh Pendidikan Terakhir Kepala Daerah terhadap pengungkapan wajib LKPD

   H_0 : $b_3 = 0$ Pendidikan terakhir kepala daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

   H_1 : $b_3 \neq 0$ pendidikan terakhir kepala daerah tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

   Berdasarkan dari hasil perhitungan menggunakan uji statistik t, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel pendidikan terakhir kepala daerah sebesar 0,502. Dikarenakan p value lebih besar dari tingkat signifikan α = 5% atau (0,502 > 0,05), maka H_3 ditolak, yang berarti pendidikan terakhir kepala daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

4. Pengaruh luas wilayah terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

   H_0 : $b_4 = 0$ luas wilayah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

   H_1 : $b_4 \neq 0$ luas wilayah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

Berdasarkan dari hasil perhitungan menggunakan uji statistik t, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel luas wilayah sebesar 0,048 maka H_4 diterima yang berarti luas wilayah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

4.6. PEMBAHASAN

Berdasarkan teori agensi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu : jumlah anggota DPRD, jumlah OPD, Pendidikan terakhir kepala daerah, luas wilayah. Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa jumlah anggota DPRD (H_1), jumlah OPD (H_2), pendidikan terakhir kepala daerah (H_3) dan luas daerah (H_4) tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Pembahasan sebagai berikut:

4.6.1. Pengaruh Jumlah Anggota DPRD terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan bahwa koefisien varian adalah 0,04 yang berarti jika terdapat kenaikan jumlah anggota DPRD sebesar 1 satuan maka tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah naik sebesar 0,04 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Hasil olah data dengan regresi juga menunjukkan nilai sig. = 0,134 dengan *Level of Significant* = 5% maka disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara jumlah anggota DPRD (H_1) terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kemungkinan karena jumlah anggota DPRD di daerah tersebut tidak dapat menekan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah mungkin disebabkan karena saat ini anggota DPRD tidak dapat memilih kepala daerah sendiri dan pemilihan kepala daerah sudah dipilih oleh masyarakat langsung melalui PILKADA sehingga anggota DPRD tidak dapat memaksa kepala daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) menyatakan bahwa ukuran legislatif yang menggunakan jumlah DPRD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Suhardjanto dan Yuliangtyas (2011) menyatakan bahwa ukuran legislatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

4.6.2. Pengaruh Jumlah OPD terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan bahwa nilai b_2 adalah 0,008 yang berarti jika terdapat kenaikan jumlah OPD sebesar 1 satuan maka tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah naik sebesar 0,008 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Hasil olah data dengan regresi juga menunjukkan nilai sig.=0,686 dengan

Level of Significant = 5% maka disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara jumlah OPD terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Pemeriksaan sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditunjukkan hasil hubungan yang tidak signifikan antara jumlah OPD dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini kemungkinan karena masih ditemukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan OPD yang masih belum menjalankan fungsi dan tugas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan laporan yang dilakukan OPD yang sifatnya merupakan kewajiban pokok maka dalam sistem pencatatannya tidak ada pembaharuan jika ada perubahan peraturan tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan seperti perubahan basis akuntansi yakni basis kas menuju akrual.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) dan Khasanah dan Raharjo (2014) yang menyatakan bahwa jumlah OPD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian yang dilakukan oleh Nurtari dkk. (2016) tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa jumlah OPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

4.6.3. Pengaruh Pendidikan Terakhir Kepala Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan bahwa nilai koefisien varian adalah 0,008 yang berarti jika terdapat kenaikan pendidikan terakhir kepala daerah sebesar 1 satuan maka tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah naik sebesar 0,008 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Hasil olah data dengan uji regresi juga menunjukkan bahwa nilai sig.=0,686 dengan *Level of Significant* = 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh positif terhadap pendidikan terakhir kepala daerah (H_3) terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah dituntut untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suhardjanto (2010) latar belakang pendidikan Bupati berpengaruh signfikan dalam tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini kemungkinan karena kepala daerah yang memiliki riwayat tingkat pendidikan terakhir yang tinggi mungkin saja bukan berlatar belakang ekonomi dan kurang memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan dalam penyajian laporan keuangannya, sehingga dalam penelitian ini latar belakang pendidikan kepala daerah tidak terbukti dapat memberikan dorongan untuk melakukan pengungkapan LKPD secara lengkap

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Setyaningrum & Syafitri (2012) yang menyatakan pendidikan terakhir tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa kepada daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) yang berwenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Seharusnya kepala daerah yang memiliki tingkat pendidikan terakhir tinggi dapat lebih mengelola keuangan daerah secara lebih baik, namun pada kenyataanya tingkat pendidikan terakhir kepala daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

4.6.4. Pengaruh Luas Wilayah terhadap Tingkat Pengungkapan wajib LKPD

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan bahwa nilai b_4 adalah -0,005 yang berarti jika terdapat kenaikan luas wilayah sebesar 1 satuan maka tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah turun sebesar 0,005 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Hasil olah data dengan regresi juga menunjukkan nilai sig.=0,048 dengan *Level of significant*= 5%, maka dapat disimpulkan bahwa luas daerah (H_4) berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Memiliki daerah yang luas merupakan suatu kelebihan dari daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan potensi dari daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, luas wilayah merupakan salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana. Daerah yang mempunyai wilayah yang lebih luas, penduduknya sama dengan daerah yang mempunyai wilayah yang lebih sempit memiliki dampak yang berbeda dengan tingkat pengungkapan LKPD. Pemerintah daerah yang memiliki luas wilayah sempit dapat lebih mudah dan efektif dalam melakukan koordinasi dan komunikasi untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan sehingga daerah yang memiliki wilayah yang lebih sempit memiliki tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah lebih tinggi daripada daerah yang memiliki wilayah yang luas. Koordinasi sangatlah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena di dalamnya terdapat banyak kegiatan yang dapat mendukung suatu tujuan yang akan dicapai dari suatu daerah. Kebutuhan koordinasi timbul sewaktu-waktu apabila pemerintahan daerah bertanggung jawab atas kesempurnaan suatu tugas. Apabila terdapat keadaan saling bergantungan diantara kegiatan-kegiatan maka hasil yang efektif akan dapat tercapai. Pemerintah daerah yang memiliki luas wilayah yang besar dapat meningkatkan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan dengan memperbaiki infrastruktur yang ada di daerah tersebut agar koordinasi dan komunikasi antar daerah dapat berjalan dengan lancar dan dapat dilakukan usaha “penyempitan daerah” yang salah satunya dengan cara pemekaran daerah sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan dapat dengan mudah melakukan

komunikasi dan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah tersebut dan hal ini akan memicu kenaikan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Meskipun daerah tersebut sudah memiliki infrastruktur yang baik namun pertemuan fisik yang dilakukan dengan tujuan koordinasi antar daerah juga sangat diperlukan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik (2009) luas wilayah daerah memang mempunyai pengaruh terhadap komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah daerah karena daerah dengan wilayah yang lebih luas dimana lebih membutuhkan komunikasi dan koordinasi tingkat daerah yang lebih.